



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR 93 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 93

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja (RENJA) ini juga menjadi tolak ukur dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Dengan meningkatnya kualitas kinerja masing-masing individu, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di tahun yang akan datang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini antara lain:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan petunjuk teknisnya.
2. Dengan ketersediaan anggaran yang ada perlu disusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan
3. Memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran yang ada.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini dibuat dengan harapan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu sangat dibutuhkan saran-saran yang membangun untuk peningkatan pelayanan perizinan di kemudian hari.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



# Rencana Kerja DPMPTSP 2022



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2022</b> .....	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Rencana Strateis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu .....	33
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) .....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	52
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b> .....	<b>53</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2 Tujuan dan sasaran Rancana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu .....	53
3.3 Program dan Kegiatan .....	54
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b> .....	<b>76</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya untuk Allah SWT, kami menyampaikan rasa syukur atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas tugas, fungsi, kewenangan serta sumber daya untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai langkah terpadu dan sistematis untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal diupayakan sinergis dengan pembangunan sektor lainnya dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Pasuruan (2018 - 2023). Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan ini berisi identifikasi yang akurat tentang kendala, kekuatan dan peluang serta hasil capaian kinerja tahun lalu sekaligus memuat Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 beserta Program dan Kegiatan.

Harapan kami penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada masa yang akan datang.

Pasuruan, Desember 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

ttd.

Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651220 199303 1 00

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan akan melibatkan serta bersentuhan langsung dengan manusia atau masyarakat. Sehingga dalam menentukan kebijakan untuk merencanakan suatu program maupun kegiatan dalam pembangunan suatu daerah perlu memperhatikan kebutuhan, aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan gender. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak maupun golongan lanjut usia (LANSIA) dapat menerima manfaat yang besar dari hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai Dinas Penyelenggara Pelayanan Publik yang terkait dengan pelayanan masyarakat secara langsung harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dihasilkan harus mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak maupun golongan lanjut usia (LANSIA).

Dalam mendukung proses pembangunan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu membuat suatu rencana kerja agar dalam melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan visi, misi, maupun sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, maka Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengarah pada kelembagaan ekonomi desa.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan selama satu tahun dan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
2. Memberi gambaran konsistensi pelaksanaan dalam mencapai target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
3. Menjamin keterkaitan antara komponen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan komponen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antara komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam dokumen hingga penjabaran ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

- 3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- 3.3 Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

### **BAB V. PENUTUP**



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Belanja Langsung</b>													
2.12.2.12.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Terelesainya Pelayanan Administrasi Perkantoran, tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	%	62	%	62%			
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb erdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Inter net, Listrik dan Sumber Daya Air yang terbayar	300	Rek-Bln	60	Rek-Bln	60	Rek-Bln	45	Rek-Bln	75%			
2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang terbayar	600	Org-Bln	120	Org-Bln	120	Org-Bln	90	Org-Bln	75%			
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah honorarium Jasa kebersihan Kantor yang terbayar	180	Org-Bln	36	Org-Bln	36	Org-Bln	27	Org-Bln	75%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	780	Jenis-Kali	156	Jenis-Kali	156	Jenis-Kali	78	Jenis-Kali	50%				
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	480	Jenis-Kali	120	Jenis-Kali	90	Jenis-Kali	43	Jenis-Kali	48%				
2.12.2.12.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	280	Jenis-Kali	56	Jenis-Kali	56	Jenis-Kali	42	Jenis-Kali	75%				
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/tamu yang tersedia	2610	Kotak	853	Kotak	615	Kotak	499	Kotak	81%				
2.12.2.12.01.01.18	Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah	250	Org-Kali	50	Org-Kali	50	Org-Kali	15	Org-Kali	30%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
			Target	Unit	Realisasi	Unit	Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah honorarium pegawai PTT, THL yang terbayar, surat kabar dan majalah serta benda pos yang tersedia	1080	Org-Bln	216	Org-Bln	216	Org-Bln	162	Org-Bln	75%				
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1	Paket			1	Paket	0	Paket	0%				
2.12.2.12.01.01.21	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM aparatur	50	Org-Kali			50	Org-Kali	18	Org-Kali	36%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)		9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM aparatur	30	Org-Kali										
	BIMTEK Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah BIMTEK peningkatan kualitas Aparatur pelayanan Perizinan Terpadu	2	Kali										
2.12.2.12.01.01.22	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan tribulan dan semester	64	Dokumen			16	Dokumen	2	Dokumen	13%			
2.12.2.12.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	29	<b>%</b>	29%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.2.12.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	40	Unit	14	Unit	10	unit	0	unit	0%			
2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	4	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0%			
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	1020	Unit-Bln	204	Unit-Bln	204	Unit-Bln	51	Unit-Bln	25%			
2.12.2.12.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang terpelihara	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%			
2.12.2.12.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara	1200	Unit-Kali	240	Unit-Kali	240	Unit-Kali	54	Unit-Kali	23%			
2.12.2.12.01.02.46	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Taman Kantor	1	Paket	1	Paket								
<b>2.12..2.12.01.18</b>	<b>PROGRAM LAYANAN NON PERIZINAN</b>	<b>Persentase Izin permohonan nonperizinan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>61</b>	<b>%</b>	<b>61%</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.12..2.12.01.18.01	Pelayanan pelaku usaha perseorangan	Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Usaha	4000	Dokumen			1,000	Dokumen	597	Izin	60%				
2.12..2.12.01.18.02	Pelayanan pelaku usaha non perseorangan	Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Lainnya	1600	Dokumen			1,000	Dokumen	113	Izin	11%				
2.12..2.12.01.18.03	Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah pemohon yang dilayani	6000	Pemohon					0	Pemohon	0%				
2.12.2.12.01.19	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PENGADUAN</b>	<b>Persentase Pengaduan yang tertangani</b>	<b>100</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	23	<b>%</b>	23%				
2.12.2.12.01.19.01	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM	48	Kali			12	Kali	4	Kali	33%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.12.2.12.01.19.02	Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	20	Kali			6	Kali	0	Kali	0%				
2.12.2.12.01.19.03	Penyusunan data investasi	Jumlah buku yang disusun	855	Buku			285	Buku	30	Buku	11%				
2.12.2.12.01.19.04	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Jumlah kegiatan pengembangan sistem Informasi penanaman modal	1	Kali			1	Kali	0	Kali	0%				
2.12.2.12.01.19.05	Pelayanan terpadu dan pengaduan	Jumlah rapat koordinasi untuk menjembatani penanganan pengaduan dan peningkatan pelayanan informasi	14	Kali			4	Kali	0	Kali	0%				
<b>2.12.2.12.01.20</b>	<b>PROGRAM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Nilai Investasi Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>				
2.12.2.12.01.20.01	Penyusunan Legalitas PM	Jumlah Dokumen Legalitas PM	2	Dokumen			1	Dokumen	0	Dokumen	0%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.2.12.01.20.02	Gelar potensi dan investasi Daerah terpadu	Jumlah Kegiatan Gelar Potensi dan Investasi daerah	10	Kali		3	Kali	0	Kali	0%			
2.12.2.12.01.20.03	Penyusunan & pemeliharaan media promosi PM	Jumlah media promosi yang disusun	8	Jenis		2	Jenis	0	Jenis	0%			
2.12.2.12.01.20.04	Penyusunan peta peluang investasi kabupaten pasuruan	Jumlah peta potensi dan peluang investasi	4	Paket		1	Paket	0	Paket	0%			
2.12.2.12.01.20.05	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah perusahaan yang diundang	265	Perusahaan		60	Perusahaan	0	Perusahaan	0%			
<b>2.12.2.12.01.21</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PERIZINAN</b>	<b>Persentase Izin yang diterbitkan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>		<b>80</b>	<b>%</b>	29	<b>%</b>	36%			
2.12.2.12.01.21.01	Pelayanan Perizinan Fisik dan Ruang	Jumlah permohonan perizinan fisik dan ruang	2000	Dokumen		500	Dokumen	152	Izin	30%			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.2.12.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	%	100	%						
2.12.2.12.06.01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan tribulan dan semester	9	Dokumen	9	Dokumen						
2.15.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>Meningkatnya efektifitas kegiatan promosi investasi dan realisasi investasi</b>	100	%	100	%						
2.15.01.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Kegiatan Temu Pengusaha	1	Kali	1	Kali						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM	12	Kali	24	Kali						
2.15.01.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi	3	Kali	4	Kali						
2.15.01.15.12	Penyusunan data investasi	Jumlah Buku data investasi Kabupaten Pasuruan	285	Buku	285	Buku						
<b>2.15.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>Persentase Peningkatan investasi dan realisasi investasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						
2.15.01.16.06	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya legalitas usaha secara elektronik (OSS)	11	Kali	11	Kali						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.18	Bidang Urusan Penanaman Modal													
2.18.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%						100	%	100	%	100%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	80	%						80	%	80	%	100%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	12	Dokumen						4	Dokumen	4	Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
			Target Kinerja Capaian Program / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2.18.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15	Laporan					5	Laporan	5	Laporan	33%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100	%					100	%	100	%	100%
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1428	Orang-Bulan					476	Orang-Bulan	476	Orang-Bulan	33%
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ perikatan	756	Orang-Bulan					252	Orang-Bulan	252	Orang-Bulan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
						Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Keuangan SKPD	420	Laporan					140	Laporan	140	Laporan	33%
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah	100	%					100	%	100	%	100%
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang sesuai ketentuan	15	Laporan					5	Laporan	5	Laporan	33%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian	100	%					100	%	100	%	100%
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60	Orang					20	Orang	20	Orang	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	Orang							50	Orang	50	Orang	33%
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	150	Orang							50	Orang	50	Orang	33%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum	100	%							100	%	100	%	100%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Unit							1	Unit	1	Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			8=(7/6)	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor	42	Unit						14	Unit	14	Unit	33%
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bahan logistik	468	Jenis- Kali						156	Jenis-Kali	156	Jenis-Kali	33%
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	270	Jenis- Kali						90	Jenis-Kali	90	Jenis-Kali	33%
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang- undangan	21	Eksempla r						7	Eksempla r	7	Eksempla r	33%
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Konsumsi Tamu dan Rapat	1620	Orang						540	Orang	540	Orang	33%
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	540	Laporan						180	Laporan	180	Laporan	33%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
						Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	%					100	%	100	%	100%
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30	Unit					10	Unit	10	Unit	33%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100	%					100	%	100	%	100%
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirimkan melalui jasa kurir	30	Surat					10	Surat	10	Surat	33%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	180	Rekening					60	Rekening	60	Rekening	33%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Jumlah penyediaan layanan umum kantor	36	Kali-Bulan					12	Kali-Bulan	12	Kali-Bulan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
						Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%					100	%	100	%	100%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	51	Unit					12	Unit-Bulan	12	Unit-Bulan	24%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	204	Unit					72	Unit-Bulan	72	Unit-Bulan	35%
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mebelair	300	Unit					100	Unit	100	Unit	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
			Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit					1	Unit	1	Unit	33%
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	720	Unit					240	Unit	240	Unit	33%
<b>2.18.02</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pengembangan iklim penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>					<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peluang Potensi da Investasi Daerah	18	Bidang					6	Bidang	6	Bidang	33%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Legalitas Penanaman Modal	3	Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Jumlah Dokumen Peluang Investasi	9	Dokumen						3	Dokumen	3	Dokumen	33%
<b>2.18.03</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Kegiatan Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
2.18.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase kegiatan promosi daerah yang terlaksana</i>	100	%						100	%	100	%	100%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	15	Kali						5	Kali	5	Kali	33%
<b>2.18.04</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani	80	%						80	%	80	%	100%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan	9000	Pelaku Usaha						3000	Pelaku Usaha	3000	Pelaku Usaha	33%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan komitmen yang dipantau	6000	Pelaku Usaha						2000	Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
			Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)			11=(10/4)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Konsultasi dan Pengaduan	1500	Pelaku Usaha							500	Pelaku Usaha	500	Pelaku Usaha	33%
2.18.05	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal</b>	100	%							100	%	100	%	100%
2.18.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana</i>	9	Kegiatan							3	Kegiatan	3	Kegiatan	33%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	36	Kali							25	Kali	25	Kali	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
			Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	18	Kali						4	Kali	4	Kali	33%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan penanaman modal	36	Kali						25	Kali	25	Kali	33%
<b>2.18.06</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase data dan sistem informasi yang dikelola</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	80	%						80	%	80	%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
						Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal	3	Paket					1	Paket	1	Paket	33%



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2020

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategis yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perizinan dan Penanaman Modal. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 dan pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tahun 2021 (Tahun Berjalan) secara terperinci dijelaskan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentang perizinan dan investasi di daerah Kabupaten Pasuruan. Anggaran belanja tahun 2022 yang akan digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah sebesar Rp. 10.626.878.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dialokasikan pada :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- C. Program Promosi Penanaman Modal.
- D. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2020 sebesar Rp. 2.354.114.957,- atau 71,32 %. Anggaran belanja langsung yang telah terealisasi ini dipergunakan untuk mendukung beberapa program, antara lain:

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- C. Program Layanan Non Perizinan
- D. Program Layanan Perizinan.
- E. Program Pengendalian Pengelolaan Data Informasi dan Pengaduan.
- F. Program Penanaman Modal

Dari sejumlah kegiatan yang ditetapkan pada program kerja tahun 2020 masih terdapat permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain:

1. Telah diterbitkannya Surat Bupati Pasuruan Nomor 900/1263/424.102/2020 Tanggal 01 April 2020 Perihal Penghematan Sementara Belanja Daerah Tahun 2020.
2. Adanya Refocusing Anggaran sebesar 50% selama terjadinya Pandemi Covid-19.

Beberapa hal tersebut yang menyebabkan pencapaiannya menjadi tidak maksimal. Kegiatan-kegiatan ini merupakan keseluruhan kegiatan pada Program Penanaman Modal dengan tingkat serapan anggarannya sebesar 0%, dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar telah dialihkan untuk Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 seperti yang telah diinstruksikan Presiden kepada seluruh Kementerian/ Lembaga dan daerah, demikian halnya dengan Kabupaten Pasuruan. Selain itu

terdapat kegiatan pada Program Penanaman Modal yang pelaksanaannya berada pada Triwulan IV, seperti pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.

Nilai investasi yang terealisasi hingga Triwulan IV pada tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan dinilai cukup baik dengan nilai Rp. 10.012.281.721.669,- dan nilai investasi ini juga telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 9.600.000.000.000,- atau 104,29%. Nilai investasi ini berasal dari berbagai sektor kegiatan, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian capaian kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan berhasil.

Jumlah permohonan izin yang diterima sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sebanyak 3.545 izin, izin yang diterbitkan sebanyak 3.216 izin. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja untuk jumlah penyelesaian izin atau izin yang telah diterbitkan pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 1.653 izin, maka angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 94,55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Berpedoman pada review Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berpedoman pada indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan & penanaman modal yang diberikan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan telah memperoleh nilai 83,23 (B) pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), namun nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,93 (B).

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan melalui jumlah nilai investasi yang terealisasi di tahun 2020 telah mengalami pencapaian yang cukup baik yaitu sebesar 10,01 T. Nilai investasi yang terealisasi ini telah melampaui target yang telah ditentukan sebesar 9,6 T. Untuk mengetahui pencapaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah nilai investasi yang terealisasi			9,6 T	10 T	10,5 T	11 T	10,01 T	-	-	-	-

Indikator tersebut di atas mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang diberikan. Unsur-unsur tersebut secara otomatis bersinggungan langsung dengan hasil kinerja yang diharapkan terutama fokus layanan pada urusan Penanaman Modal.

Berkenaan dengan Tugas dan Fungsinya, beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Bersamaan dengan naiknya minat investor dari para pelaku usaha mikro kecil untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan, masih tetap dibutuhkan adanya pemberian informasi kepada semua pelaku usaha terkait dengan pemenuhan komitmen terhadap pengajuan suatu ijin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan pemberian informasi yang jelas kepada semua pelaku usaha tersebut sehingga banyak yang memahami terhadap pengajuan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan kehadiran sistem baru ini, akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan legalitas dan selanjutnya mereka akan memiliki ketertarikan kembali untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan.
2. Pandemi Covid -19 yang telah melemahkan kondisi ekonomi nasional juga berimbas terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Hampir semua sektor usaha terdampak oleh pandemi ini. Dengan kondisi demikian, pemulihan perekonomian menjadi fokus tugas pemerintah saat ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan memiliki peran penting dalam memberikan segala kemudahan dalam pemberian legalitas bagi Pelaku Usaha khususnya bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga mereka dengan penuh semangat kembali melakukan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan demikian perekonomian masyarakat dapat kembali beranjak untuk pulih.

3. Dengan adanya Pandemi Covid-19 menuntut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan untuk membuat suatu inovasi agar pelayanan perizinan tidak terhambat dan tetap dapat berjalan dengan baik. Bentuk inovasi tersebut adalah dengan memanfaatkan perkembangan di dunia teknologi informasi sehingga beberapa pelayanan perizinan yang masih membutuhkan sistem tatap muka dengan petugas telah ditiadakan dan beralih dengan pengoptimalan fasilitas sistem online yang telah tersedia. Selain itu telah disediakan dropbox yang berfungsi sebagai tempat berkas yang berisi surat permohonan beserta persyaratannya yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pemohon yang telah terlanjur mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Dengan berkurangnya pemohon yang datang menyebabkan berkurang pula kegiatan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh petugas pelayanan terhadap para pemohon tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Dengan adanya tuntutan atas kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan sederhana serta peningkatan iklim investasi daerah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk terus berinovasi guna mewujudkan harapan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta beberapa pelayanan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap unsur-unsur pelayanan tersebut dengan harapan peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal akan diimbangi meningkatnya nilai investasi. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan penerapan kesesuaian pelayanan dengan Standar Manajemen Mutu 9001:2015
2. Mengoptimalkan Sistem Informasi Perizinan, untuk menjawab tantangan penyederhanaan prosedur dan kecepatan pelayanan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah dijangkau baik dalam hal informasi, pengajuan permohonan, ataupun wadah menyampaikan saran dan pengaduan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan dengan pendidikan dan pelatihan formal berkenaan dengan pelayanan perizinan.
4. Mengoptimalkan promosi peluang berinvestasi di Kabupaten Pasuruan dengan kegiatan pameran khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta koordinasi dengan dunia usaha yang lebih informatif dan tepat sasaran.
5. Mengajak calon investor untuk lebih meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan potensi pariwisata Kabupaten Pasuruan.

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.**

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dan terdiri dari faktor internal berupa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Beberapa hasil identifikasi tersebut antara lain:

#### **1. Identifikasi faktor internal :**

- a. Kekuatan (*strength*)
  1. Adanya potensi investasi wilayah
  2. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian menguasai bidangnya
  3. Mempunyai sarana dan prasarana
  4. Adanya komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong pelaksanaan perizinan satu pintu
- b. Kelemahan (*weakness*)
  1. Penataan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) belum satu pintu.
  2. Kurang tersedianya data-data dan informasi peluang investasi yang up to date
  3. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan secara online.
  4. Kurang optimalnya penguasaan di bidang penanaman modal.
  5. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

#### **2. Identifikasi faktor eksternal:**

- a. Peluang (*Opportunities*) :
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Masih tersedianya kawasan industri.

3. Adanya tawaran promosi investasi di luar daerah.
- b. Ancaman (*threats*):
  1. Semakin banyaknya daerah lain sebagai tujuan penanaman modal.
  2. Belum tergalinya potensi investasi daerah
  3. Belum optimalnya potensi investasi daerah

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pasuruan, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi informasi tata ruang
2. Izin yang membutuhkan Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis butuh waktu yang lama karena belum berada pada 1(satu) atap.
3. Pembahasan perubahan tata ruang belum tuntas
4. Kawasan wilayah timur belum dimanfaatkan
5. Belum terintegrasinya secara online dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah tersebut maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan sosialisasi informasi tata ruang
2. Dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP)
3. Percepatan pembahasan perubahan tata ruang.
4. Dibangunnya aplikasi terintegrasi secara elektronik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.
5. Merencanakan wilayah timur sebagai kawasan industri

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan salah satu perpektif strategi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan dan Menurunkan Ketimpangan Ekonomi Antar Kawasan (Pasuruan Podo Roso) yang merupakan strategi dalam rangka menurunkan ketimpangan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kawasan baik dalam hal infrastruktur maupun pelayanan publik terutama kawasan timur.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)**

Program dan kegiatan pada awal usulan terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan hal ini sama dengan pada saat analisis kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut berikut tabel Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan. (Lampiran Tabel 2.3)



**Tabel. 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Kabupaten Pasuruan**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	6,427,778,000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	6,427,778,000	
1	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pemenuhan dokumen SAKIP</i>	80	%	22,500,000	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pemenuhan dokumen SAKIP</i>	80	%	22,500,000	
a	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4	Dokumen	4,500,000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4	Dokumen	4,500,000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5	Laporan	18,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5	Laporan	18,000,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100	%	5,083,178,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100	%	5,083,178,000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang-Bulan	4,437,483,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang-Bulan	4,437,483,000	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ perikatan	252	Orang-Bulan	530,695,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ perikatan	252	Orang-Bulan	530,695,000	
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Keuangan SKPD	140	Laporan	115,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Keuangan SKPD	140	Laporan	115,000,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah	100	%	75,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah	100	%	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang sesuai ketentuan	5	Laporan	75,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang sesuai ketentuan	5	Laporan	75,000,000	
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian</i>	100	%	90,000,000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian</i>	100	%	90,000,000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	Orang	50,000,000	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	50	Orang	20,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	50	Orang	20,000,000	
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	50	Orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	50	Orang	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan administrasi umum	100	%	425,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan administrasi umum	100	%	425,000,000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Unit	150,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Unit	150,000,000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14	Unit	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14	Unit	10,000,000	
c	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah bahan logistik	156	Jenis-Kali	85,000,000	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah bahan logistik	156	Jenis-Kali	85,000,000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	90	Jenis-Kali	65,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	90	Jenis-Kali	65,000,000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan	7	Eksemplar	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan	7	Eksemplar	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
f	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Konsumsi Tamu dan Rapat	540	Orang	20,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Konsumsi Tamu dan Rapat	540	Orang	20,000,000	
g	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	180	Laporan	85,000,000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	180	Laporan	85,000,000	
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase pengadaan barang milik daerah</i>	100	%	85,000,000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase pengadaan barang milik daerah</i>	100	%	85,000,000	
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10	Unit	85,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10	Unit	85,000,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang	100	%	328,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang	100	%	328,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang dikirimkan melalui jasa kurir	10	Surat	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang dikirimkan melalui jasa kurir	10	Surat	3,500,000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	60	Rekening	300,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	60	Rekening	300,000,000	
c	Penyediaan Jasa pelayanan Umum		Jumlah penyediaan layanan umum kantor	12	Kali-Bulan	25,000,000	Penyediaan Jasa pelayanan Umum		Jumlah penyediaan layanan umum kantor	12	Kali-Bulan	25,000,000	
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	100	%	318,600,000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	100	%	318,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	12	Unit- Bulan	74,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	12	Unit- Bulan	74,750,000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	72	Unit- Bulan	118,850,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	72	Unit- Bulan	118,850,000	
c	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mebelair	100	Unit	50,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mebelair	100	Unit	50,000,000	
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	50,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240	Unit	25,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240	Unit	25,000,000	
II	<b>Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pengembang an iklim penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	292,500,000	<b>Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pengembang an iklim penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	292,500,000	
1	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Peluang Potensi da Investasi Daerah</i>	6	<i>Bidang</i>	292,500,000	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Peluang Potensi da Investasi Daerah</i>	6	<i>Bidang</i>	292,500,000	
a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Legalitas Penanaman Modal	1	Dokumen	115,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Legalitas Penanaman Modal	1	Dokumen	115,000,000	
b	Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		Jumlah Dokumen Peluang Investasi	3	Dokumen	177,500,000	Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		Jumlah Dokumen Peluang Investasi	3	Dokumen	177,500,000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
III	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase Kegiatan Penanaman Modal</b>	100	%	770,000,000	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase Kegiatan Penanaman Modal</b>	100	%	770,000,000	
1	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase kegiatan promosi daerah yang terlaksana</i>	100	%	770,000,000	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase kegiatan promosi daerah yang terlaksana</i>	100	%	770,000,000	
a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5	Kali	770,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5	Kali	770,000,000	
IV	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal</b>	100	%	2,819,000,000	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal</b>	100	%	2,819,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani	80	%	2,819,000,000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani	80	%	2,819,000,000	
a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan	3000	Pelaku Usaha	2,500,000,000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan	3000	Pelaku Usaha	2,500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah pemenuhan komitmen yang dipantau	2000	Pelaku Usaha	230,000,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah pemenuhan komitmen yang dipantau	2000	Pelaku Usaha	230,000,000	
c	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Konsultasi dan Pengaduan	500	Pelaku Usaha	89,000,000	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Konsultasi dan Pengaduan	500	Pelaku Usaha	89,000,000	
V	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>167,600,000</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>167,600,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Darah kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana</i>	3	Kegiatan	167,600,000	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Darah kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana</i>	3	Kegiatan	167,600,000	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan penanaman Modal		Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	12	Kali	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan penanaman Modal		Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	12	Kali	35,000,000	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6	Kali	97,600,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6	Kali	97,600,000	
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan pengawasan penanaman modal	12	Kali	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan pengawasan penanaman modal	12	Kali	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase data dan sistem informasi yang dikelola	100	%	150,000,000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase data dan sistem informasi yang dikelola	100	%	150,000,000	
1	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase perizinan dan nonprizinan yang diterbitkan</i>	80	%	150,000,000	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase perizinan dan nonprizinan yang diterbitkan</i>	80	%	150,000,000	
a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal	1	Paket	150,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal	1	Paket	150,000,000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan disusun melalui usulan dan koordinasi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan. Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan telah disusun dengan melihat segala kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu titik berat program nasional adalah Peningkatan Investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dalam salah satu programnya telah mengacu pada program nasional tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pasuruan No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai Visi yang berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, yaitu "Menuju Kabupaten Pasuruan Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing". Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) juga mempunyai sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Nilai Investasi Daerah dengan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya pelayanan perizinan maupun non perizinan yang cepat serta lebih sederhana menjadi tugas pemerintah saat ini. Demi tercapainya peningkatan nilai investasi serta menjaga iklim usaha yang kondusif menjadi motivasi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu menjawab keinginan masyarakat tersebut. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta beberapa pelayanan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal inilah yang mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu membuat Mal Pelayanan Publik.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

##### **3.2.1 Tujuan Rencana Kerja (RENJA)**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi dan kewenangannya, untuk itu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bertujuan:

Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas dalam meningkatkan investasi daerah

### **3.2.2 Sasaran Rencana Kerja (RENJA)**

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi. Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2022 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah:

1. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah dengan indikator :

Jumlah nilai investasi yang terealisasi = 10,5 T

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2022 tersebut, maka ditetapkan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan untuk mengimplementasikan rencana strategis.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menetapkan rumusan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 serta sesuai dengan salah Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang keempat yaitu “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi” dengan tujuan “Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas dalam meningkatkan investasi daerah”.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- c. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- f. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*
- g. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- h. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- a. *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota*

**3. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. *Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*

**6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*

Untuk mengetahui Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 di berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Pasuruan**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Pasuruan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2.18	Bidang Urusan Penanaman Modal								
2.18.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Pasuruan		Belanja Pegawai : 4,437,483,000 Belanja Barang&Jasa : 1,990,295,000 Belanja Modal : 0 <b>6,427,778,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan			7,070,555,800
2.18.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	DPMPT Kab. Pasuruan	80%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 22,500,000 Belanja Modal : 0 <b>22,500,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		80%	24,750,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.01.01	1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun		4 Dokumen	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 4,500,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 4,500,000			4 Dokumen	4,950,000
2.18.01.2.01.07	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		5 Laporan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 18,000,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 18,000,000			5 Laporan	19,800,000
2.18.01.2.02	2 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>DPMPPT Kab. Pasuruan</b>	<b>100%</b>	<b>Belanja Pegawai : 4,437,483,000</b> <b>Belanja Barang&amp;Jasa : 645,695,000</b> <b>Belanja Modal : 0</b> <hr/> <b>5,083,178,000</b>	<b>APBD Kabupaten Pasuruan</b>		<b>100%</b>	<b>5,591,495,800</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.02 01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		476 Orang-Bulan	Belanja Pegawai : 4,437,483,000 Belanja Barang&Jasa : 0 Belanja Modal : 0 <u>4,437,483,000</u>			476 Orang-Bulan	4,881,231,300
2 18 01 2.02 02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ perikatan		252 Orang-Bulan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 530,695,000 Belanja Modal : 0 <u>530,695,000</u>			252 Orang-Bulan	583,764,500
2.18.01.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Keuangan SKPD		140 Laporan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 115,000,000 Belanja Modal : 0 <u>115,000,000</u>			140 Laporan	126,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.03	3 Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah	DPMPPT Kab. Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 75,000,000 Belanja Modal : 0 <b>75,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	82,500,000
2.18.01.02.03.02	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang sesuai ketentuan		5 Laporan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 75,000,000 Belanja Modal : 0 <b>75,000,000</b>			5 Laporan	82,500,000
2.18.01.2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian	DPMPPT Kab. Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 90,000,000 Belanja Modal : 0 <b>90,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	99,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		20 Orang	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 50,000,000 Belanja Modal : 0 <u>50,000,000</u>			20 Orang	55,000,000
2.18.01.2.05.10	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		50 Orang	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 20,000,000 Belanja Modal : 0 <u>20,000,000</u>			50 Orang	22,000,000
2.18.01.2.05.11	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis		50 Orang	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 20,000,000 Belanja Modal : 0 <u>20,000,000</u>			50 Orang	22,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum	DPMPT Kab. Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 425,000,000 Belanja Modal : 0 <b>425,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	467,500,000
2.18.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		1 Unit	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 0 Belanja Modal : 150,000,000 <b>150,000,000</b>			1 Unit	165,000,000
2.18.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		14 Unit	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 10,000,000 Belanja Modal : 0 <b>10,000,000</b>			14 Unit	11,000,000
2.18.01.2.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bahan logistik		156 Jenis-Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 85,000,000 Belanja Modal : 0 <b>85,000,000</b>			156 Jenis-Kali	93,500,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.06.05	4  Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		90 Jenis-Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 65,000,000 Belanja Modal : 0 <u>65,000,000</u>			90 Jenis-Kali	71,500,000
2.18.01.2.06.06	5  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan		7 Eksemplar	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 10,000,000 Belanja Modal : 0 <u>10,000,000</u>			7 Eksemplar	11,000,000
2.18.01.2.06.08	6  Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Konsumsi Tamu dan Rapat		540 Orang	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 20,000,000 Belanja Modal : 0 <u>20,000,000</u>			540 Orang	22,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.06.09	7  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah		180 Laporan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 85,000,000 Belanja Modal : 0 <u>85,000,000</u>			180 Laporan	93,500,000
2.18.01.2.07	6  <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>	<b>DPMPT Kab. Pasuruan</b>	<b>100%</b>	<b>Belanja Pegawai : 0</b> <b>Belanja Barang&amp;Jasa : 85000000</b> <b>Belanja Modal : 0</b> <b>85000000</b>	<b>APBD Kabupaten Pasuruan</b>		<b>100%</b>	<b>93,500,000</b>
2.18.01.2.07.11	1  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		10 Unit	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 0 Belanja Modal : 85,000,000 <u>85,000,000</u>			10 Unit	93,500,000
2.18.01.2.08	7  <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang</b>	<b>DPMPT Kab. Pasuruan</b>	<b>100%</b>	<b>Belanja Pegawai : 0</b> <b>Belanja Barang&amp;Jasa : 328,500,000</b> <b>Belanja Modal : 0</b> <b>328,500,000</b>	<b>APBD Kabupaten Pasuruan</b>		<b>100%</b>	<b>361,350,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirimkan melalui jasa kurir		10 Surat	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 3,500,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 3,500,000			10 Surat	3,850,000
2.18.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan		60 Rekening	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 300,000,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 300,000,000			60 Rekening	330,000,000
2.18.01.2.08.04	3 Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Jumlah penyediaan layanan umum kantor		12 Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 25,000,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 25,000,000 -				27,500,000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>DPMPT Kab. Pasuruan</b>	<b>100%</b>	<b>Belanja Pegawai : 0</b> <b>Belanja Barang&amp;Jasa : 318,600,000</b> <b>Belanja Modal : 0</b>	<b>APBD Kabupaten Pasuruan</b>		<b>100%</b>	<b>350,460,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<b>318,600,000</b>				
2.18.01.2.09.01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional		12 Unit-Bulan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 74,750,000 Belanja Modal : 0 <u>74,750,000</u>			12 Unit-Bulan	82,225,000
2.18.01.2.09.02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		72 Unit-Bulan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 118,850,000 Belanja Modal : 0 <u>118,850,000</u>			72 Unit-Bulan	130,735,000
2.18.01.2.09.05	3 Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mebelair		100 Unit	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 50,000,000 Belanja Modal : 0 <u>50,000,000</u>			100 Unit	55,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.09.09	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	Belanja Pegawai : 0  Belanja Barang&Jasa : 50,000,000  Belanja Modal : 0 <hr/> 50,000,000			1 Unit	55,000,000
2.18.01.2.09.11	5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		240 Unit	Belanja Pegawai : 0  Belanja Barang&Jasa : 25,000,000  Belanja Modal : 0 <hr/> 25,000,000			240 Unit	27,500,000
<b>2.18.02</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pengembangan iklim penanaman modal</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>100%</b>	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 292,500,000 Belanja Modal : 0 <hr/> <b>292,500,000</b>	<b>APBD Kabupaten Pasuruan</b>		<b>100%</b>	<b>337,250,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.02.2.02	1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peluang Potensi da Investasi Daerah	Kabupaten Pasuruan	6 Bidang	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 292,500,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 292,500,000			6 Bidang	337,250,000
2.18.02.2.02.01	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Legalitas Penanaman Modal		1 Dokumen	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 115,000,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 115,000,000			1 Dokumen	126,500,000
2.18.02.2.02.02	2 Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Jumlah Dokumen Peluang Investasi		3 Dokumen	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 177,500,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 177,500,000			3 Dokumen	210,750,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Penanaman Modal	Kabupaten Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 770,000,000 Belanja Modal : 0 <b>770,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	885,500,000
2.18.03.2.01	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan promosi daerah yang terlaksana	Kabupaten Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 770,000,000 Belanja Modal : 0 <b>770,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	885,500,000
2.18.03.2.01.02	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal		5 Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 770,000,000 Belanja Modal : 0 <b>770,000,000</b>			5 Kali	885,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal	Kabupaten Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 2,819,000,000 Belanja Modal : 0 <b>2,819,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	3,100,900,000
2.18.04.2.01	1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani	Kabupaten Pasuruan	80%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 2,819,000,000 Belanja Modal : 0 <b>2,819,000,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		80%	2,869,500,000
2.18.04.2.01.01	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan		3000 Pelaku Usaha	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 2,500,000,000 Belanja Modal : 0 <b>2,500,000,000</b>			3000 Pelaku Usaha	2,500,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.04.2.01.02	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan komitmen yang dipantau		2000 Pelaku Usaha	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 230,000,000 Belanja Modal : 0 <u>230,000,000</u>			2000 Pelaku Usaha	255,000,000
2.18.04.2.01.03	3 Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Konsultasi dan Pengaduan		500 Pelaku Usaha	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 89,000,000 Belanja Modal : 0 <u>89,000,000</u>			500 Pelaku Usaha	114,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal	Kabupaten Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 167,600,000 Belanja Modal : 0 <b>167,600,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	192,750,000
2.18.05.2.01	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana	Kabupaten Pasuruan	3 Kegiatan	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 167,600,000 Belanja Modal : 0 <b>167,600,000</b>	APBD Kabupaten Pasuruan		3 Kegiatan	192,750,000
2.18.05.2.01.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal		12 Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 35,000,000 Belanja Modal : 0 <b>35,000,000</b>			12 Kali	42,695,000
2.18.05.2.01.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		6 Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 97,600,000 Belanja Modal : 0 <b>97,600,000</b>			6 Kali	107,360,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.05.2.01.03	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan penanaman modal		12 Kali	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 35,000,000 Belanja Modal : 0 <hr/> 35,000,000			12 Kali	42,695,000
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi yang dikelola	Kabupaten Pasuruan	100%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 150,000,000 Belanja Modal : - <hr/> 150,000,000	APBD Kabupaten Pasuruan		100%	172,500,000
2.18.06.2.01	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	Kabupaten Pasuruan	80%	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 150,000,000 Belanja Modal : 0	APBD Kabupaten Pasuruan		80%	172,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<b>150,000,000</b>				
2.18.06.2.01.01	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal		1 Paket	Belanja Pegawai : 0 Belanja Barang&Jasa : 150,000,000 Belanja Modal : 0 <u>150,000,000</u>			1 Paket	172,500,000
					Belanja Pegawai : 4,437,483,000 Belanja barang & jasa : 6,189,395,000 Belanja modal : 0				
					<b>Total Belanja PD : 10,626,878,000</b>				<b>11,751,065,800</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mendukung program unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan “Pasuruan Podo Roso” yang memiliki tujuan untuk menurunkan ketimpangan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kawasan baik alam hal infrastruktur maupun pelayanan publik terutama kawasan timur, serta demi terwujudnya tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, yaitu untuk mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas dalam meningkatkan investasi, maka telah dirumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini diarahkan pada beberapa kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1(satu) sub kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa pelayanan Umum.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Mebel; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Program ini diharapkan dapat memenuhi target capaian kinerja berupa persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

#### **B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten. Program ini diharapkan dapat memenuhi target capaian kinerja berupa persentase pengembangan iklim penanaman modal sebesar 100%.

#### **C. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini diharapkan dapat memenuhi target capaian kinerja pada persentase kegiatan penanaman modal sebesar 100%.

#### **D. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dan Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan. Program ini diharapkan dapat memenuhi target capaian kinerja pada Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal sebesar 100%.

#### **E. Program Pengendalian Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini diharapkan dapat memenuhi target capaian kinerja pada Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal sebesar 100 %.

#### **F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini diharapkan dapat memenuhi target capaian kinerja pada Persentase data dan sistem informasi yang dikelola sebesar 100%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja (RENJA) ini juga menjadi tolak ukur dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Dengan meningkatnya kualitas kinerja masing-masing individu, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di tahun yang akan datang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini antara lain:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan petunjuk teknisnya.
2. Dengan ketersediaan anggaran yang ada perlu disusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan
3. Memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran yang ada.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini dibuat dengan harapan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu sangat dibutuhkan saran-saran yang membangun untuk peningkatan pelayanan perizinan di kemudian hari.

Pasuruan, Desember 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

ttd.

**Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651220 199303 1 007